

Peran Maryam Khatoon Molkara dan Ayatollah Khomeini terhadap Akses Teknologi Kesehatan (Operasi Perubahan Kelamin) bagi Transgender dan Transeksual di Iran

Madeline Kisariani Jahamou

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya
madelinejahamou@gmail.com

Abstract

Tulisan ini merupakan kajian dari globalisasi dan strategi yang akan berfokus pada akses teknologi kesehatan bagi para transgender dan transeksual di Iran. Konflik yang disebabkan oleh perbedaan orientasi seksual merupakan sebuah isu yang paling berkembang pada masa globalisasi seperti saat ini dalam masyarakat. Isu yang juga merupakan isu yang dikaji dalam ilmu hubungan internasional ini memperlihatkan bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan keamanan individu bagi masyarakatnya khususnya bagi para transgender dan transeksual. Proses globalisasi yang turut berkontribusi pada perkembangan teknologi kesehatanlah yang menjadi dikursus tersendiri dalam melihat isu transgender dan transeksual. Berbeda dengan banyak negara yang masih melarang masyarakatnya untuk merubah jenis kelamin, Iran memiliki kebijakan yang berbeda terkait perubahan jenis kelamin. Ini semua berdasarkan alasan medis dan tentunya peran individu seperti Maryam Khatoon Molkara dan juga Ayatollah Khomeini. Lebih lanjut lagi, tulisan ini akan mengkaji bagaimana peran individu serta globalisasi dapat mewujudkan akses teknologi (Operasi Perubahan Kelamin) dilakukan secara legal di Iran.

Keywords: Maryam Khatoon Molkara; Ayatollah Khomeini; Globalisasi; Akses Teknologi Kesehatan; Transgender dan Transeksual

Pendahuluan

Konflik dan kekerasan bahkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah isu yang paling berkembang pada masa globalisasi seperti saat ini dalam masyarakat dan merupakan isu yang dikaji dalam ilmu hubungan internasional. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa proses globalisasi telah berkontribusi terhadap perkembangan penyebaran isu HAM di dunia saat ini. Bahkan beberapa isu HAM telah menjadi isu yang berkembang pada tingkat internasional, menjadi perhatian publik, dan (dalam beberapa kasus) telah

menjadi salah satu isu penting dalam agenda setting negara dalam pembuatan kebijakan dalam maupun luar negeri. Menurut Alison Brysk, salah satu karakteristik utama dalam dunia kontemporer ini adalah globalisasi yang berarti meningkatnya penetrasi negara, pasar, komunikasi, dan gagasan lintas batas. Lebih lanjut lagi, Brysk menyatakan bahwa norma-norma dan lembaga-lembaga internasional untuk perlindungan hak asasi manusia lebih berkembang daripada titik sebelumnya dalam sejarah (Brysk, 2002).¹ Artinya, globalisasi merupakan titik awal dari peningkatan dan perkembangan hubungan antar individu, lembaga, dan negara secara lintas batas. Perkembangan isu HAM di tingkat nasional maupun internasional memang didorong oleh proses globalisasi. Hingga saat ini, terdapat 2 aktor utama yang melakukan aksinya agar terciptanya HAM, yaitu aktor individu dan NGO (organisasi non pemerintah). Aktor-aktor ini hadir untuk berkontribusi bagi pihak-pihak yang merasa hak mereka sebagai manusia tidak terpenuhi secara utuh.

Pengertian HAM dalam pembukuan dari Universal Declaration of Human Right menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi (Wilujeng, 2019).² The Universal Declaration of Human Rights dinyatakan pertama kali pada 10 Desember tahun 1948 dan merupakan awal dari terciptanya HAM di dunia oleh lembaga PBB (United Nations, 2015).^u Dalam The Universal Declaration of Human Rights terdapat 30 pasal regulasi substansi

HAM dalam konteks basic rights (hak-hak dasar), dan basic needs (kebutuhan dasar) (OHCHR, 2016).³ Dengan didorong oleh proses globalisasi, individu dan NGO (yang memiliki kepentingan agar hak-hak mereka terpenuhi) mampu mencapai tujuannya khususnya terhadap isu-isu HAM yang disuarakan.

Kejadian-kejadian ini dapat dilihat dari seseorang yang bernama Maryam Khatoon Molkara yang melakukan aksi protes dihadapan Ayatollah Khomeini (pemimpin Iran) untuk mendapatkan dukungan baginya dan komunitasnya dalam mengakses teknologi kesehatan berupa operasi perubahan kelamin. Dari penjelasan tersebut, penulis menarik satu pertanyaan penelitian yaitu bagaimana komunitas transgender dan transeksual di Iran bisa mendapatkan akses terhadap teknologi kesehatan berupa operasi perubahan kelamin? Dengan pernyataan penelitian bahwa penulis percaya peran dari Maryam sebagai transgender pertama dalam menggiring opini dan perspektif dari kepentingan kesehatan komunitas transgender dan transeksual di Iran menjadikan kebijakan kesehatan bagi komunitas ini diberikan oleh Ayatollah Khomeini. Hal ini juga karena adanya peran pemerintah yang harus menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagai perwujudan dari HAM rakyat khususnya dalam memberikan akses kesehatan. Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa setiap manusia lahir dengan membawa hak asasi yang melekat dan tidak dapat dihilangkan. Hak asasi tersebut harus

dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak (Ayu et al., 2013). Salah satunya adalah bagi mereka para transgender dan transeksual.

Metode Penelitian

Tulisan ini akan melihat bagaimana akses terhadap teknologi kesehatan bagi individu maupun komunitas dipenuhi oleh pemerintah. Dengan menggunakan bagan pemikiran yang disusun oleh Frost dan Reich (2009), penulis akan menganalisa akses teknologi kesehatan ini disebut 4 As yang meliputi Architecture, Availability, Affordability, dan Adoption. Architecture merupakan bagan pertama yang menaungi 3 As yang lain. Affordability akan melihat bagaimana 3 aktor mulai dari Pemerintah, NGO, dan pengguna menyediakan Akses teknologi kesehatan tersebut. Availability melihat bagaimana proses manufaktur, perencanaan, pembelian, distribusi, dan pengiriman membantu akses terhadap teknologi kesehatan. Yang ketiga adalah adoption yang meliputi pengadopsian secara global, nasional, dari penyedia, serta pengguna dan penggunaan yang sesuai (Frost & Reich, 2009).⁴

Pembahasan

Era modern ini dunia internasional telah mengalami banyak perkembangan. Manusia telah mengalami banyak kemajuan, banyak penemuan-penemuan yang memudahkan pekerjaan manusia saat ini. Terutama globalisasi, globalisasi yang terjadi saat ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan zaman yang dialami manusia sekarang. Globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) memiliki arti proses masuknya ke ruang lingkup dunia, yang berarti globalisasi adalah proses masuknya sesuatu perkembangan baru ke dalam dunia internasional. Globalisasi memudahkan untuk terjadinya pertukaran informasi antar negara serta memudahkan penyebaran informasi lintas negara. Globalisasi juga menjadikan negara seperti tidak memiliki batas antar negara satu dengan negara lainnya.

Menurut Giddens (Baylish & Smith, 2004),⁵ Globalisasi adalah “Globalization is the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles and vice versa”. Lebih lanjut lagi, menurut Wasisto, Munculnya wacana globalisasi dapat ditelisik dari essai Immanuel Kant pada tahun 1795 tentang kedamaian abadi (perpetual peace) melalui penciptaan satu sistem terintegrasi untuk seluruh bangsa di dunia (Jati, 2013).⁶ Pandangan tersebut bersumber pada pengalaman perang tak berkesudahan antar bangsa di Eropa selama rentang waktu 1618–1648 yang berakhir pada traktat Westphalia dengan penegasan teritorialisasi. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa globalisasi merupakan proses yang menyebar secara menyeluruh dan mempengaruhi hubungan sosial serta menyebabkan perubahan di level lokal walaupun terpisah dengan jarak yang jauh. Artinya proses globalisasi

menyempitkan jarak antara para aktor yang melakukan interaksi sosial. Dari interaksi tersebut, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat globalpun dapat terjadi.

Perkembangan globalisasi menurut Mansbach yang berawal dari perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi telah menjadikan globalisasi sebagai proses yang tidak hanya berpusat pada perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Kecerdasan buatan dalam teknologi kesehatan juga berkembang dengan baik pada saat ini. Penyempitan atau hilangnya batasan negara dengan menghadirkan banyak aktor lain diluar negara menjadikan perkembangan teknologi kesehatan sebagai teknologi yang membantu kelangsungan hidup manusia. Teknologi kesehatan yang makin berkembang pada era globalisasi nyatanya tidak dapat diakses oleh semua masyarakat di dunia. Hal ini karena ada pembatasan bahkan larangan penggunaan teknologi kesehatan berdasarkan nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat atau dalam negara tersebut. Hal ini disebut sebagai hambatan dalam mengakses teknologi kesehatan.

Menurut Frost dan Reich, akses tidak hanya sebuah isu teknis yang melibatkan proses logistik dari pengantaran teknologi dari pengusaha pabrik kepada pengguna. Akses juga melibatkan nilai-nilai dari sosial, kepentingan ekonomi dan proses politiknya. Akses juga menyediakan produk sebaik sebuah layanan dan tergantung pada bagaimana performa sistem kesehatan secara praktis. Lebih lanjut lagi Frost juga menjelaskan bahwa akses bukanlah suatu acara yang tunggal tapi merupakan proses yang berkelanjutan yang melibatkan rangkaian aktifitas dan aktor sepanjang waktu (Frost & Reich, 2009).⁷ Permasalahan akses ini juga dialami oleh para transgender yang berada di Iran.

Perbedaan orientasi seksual seseorang merupakan sebuah isu yang terus berkembang khususnya pada era globalisasi saat ini dalam masyarakat. Keberadaan mereka yang termarginalkan menjadikan mereka membentuk komunitas-komunitas baik di level nasional maupun internasional. Perbedaan orientasi seksual dalam tulisan ini akan berfokus pada transeksual dan transgender dan bukan ketertarikan individu dengan sesama jenis atau perbedaan orientasi seksual lainnya. Menurut Bettcher, individu yang dapat dikategorikan sebagai transgender adalah orang yang penampilannya tidak sama dengan peranan gender yang telah diterima sejak dilahirkan, sedangkan transeksual adalah individu yang secara hormonal atau pembedahan melakukan perubahan terhadap alat kelamin dan tubuhnya (Ayu et al., 2013).⁸ Para individu yang merasa dirinya adalah transgender atau transeksual biasanya berada dalam kelompok LGBT atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

Pada umumnya kelompok ini masih mendapatkan banyak kekerasan dan diskriminasi dalam urusan kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan (KPPPA dan Pusat Penelitian Kesehatan UI, 2015).

Tapi berbeda dengan yang terjadi bagi transgender di Iran. Kebijakan dibolehkannya operasi perubahan kelamin bagi para transgender nyatanya diperbolehkan bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini, membuktikan bahwa akses teknologi kesehatan bagi transgender sangat baik di negara Iran. Tidak hanya itu, pada tahun 2008 BBC melaporkan bahwa kebijakan Iran ini menjadikan negara muslim ini sebagai negara kedua setelah Thailand yang memperbolehkan operasi perubahan kelamin. Bahkan dari tahun 2006-2014 tercatat sebanyak 1.400 pelamar yang meminta persetujuan dilakukannya proses operasi ini setelah pemerintah mempublikasikan kebijakannya di media (Bagri, 2017).⁹

Sebagai negara yang menerapkan sistem hukum Islam, Iran telah banyak berjuang melewati gejolak politik dalam negerinya. Dengan adanya Ayatullah Khomeini, Revolusi Islam di Iran dapat terwujud. Terjadinya revolusi di Iran pada tahun 1979 nyatanya menggemparkan seluruh dunia khususnya dunia Islam itu sendiri. Rezim yang sedang berkuasa pada saat itu yaitu Muhammad Reza Pahlevi dan dinobatkan sebagai putra mahkota 25 April 1926 nyatanya berakhir hingga 1 Februari 1979 (Sujati, 2019).¹⁰

Bangsa yang awal pemerintahannya diawali dengan pemerintahan dinasti yang berlangsung selama 25 abad dan didukung oleh kekuatan Amerika Serikat dan Inggris akhirnya dapat ditumbangkan dengan kekuatan dari massa yang dipelopori oleh para

Mullah (Sumarno, 2020).¹¹ Negara Iran sendiri telah mengalami dua Perubahan besar revolusioner pada abad kedua puluh. Yang pertama terjadi pada tahun 1905 dimana terjadi revolusi Konstitusional yang berakar pada nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme orang-orang Iran dan dipimpin oleh cendekiawan modern. Suatu Undang-Undang Dasar yang sekular akhirnya berhasil disusun dalam revolusi ini. Revolusi yang kedua adalah revolusi yang terjadi pada tahun 1979 dimana revolusi Islam Iran terjadi. Revolusi ini di ilhami oleh nasionalisme Iran dan Islam. Dari revolusi ini ulama tradisional ditempatkan sebagai penguasa politik yang paling utama di bawah undang-undang yang agamis pada tahun itu (Sujati, 2019).¹² Ulama tradisional pada saat itu yang akhirnya memiliki kuasa politik di Iran adalah Ayatollah Khomeini.

Di tengah revolusi Islam terjadi di Iran, ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Ayatollah Khomeini atau yang di sebut dengan Fatwa. Fatwa yang menyatakan kelegalitasan kaum transgender untuk melakukan proses operasi perubahan kelamin ini akhirnya menjadi dasar bagi seluruh kaum transgender dan transeksual di Iran untuk mengakses teknologi kesehatan tersebut. Dikeluarkannya fatwa ini merupakan sebuah sejarah dan fenomena yang menarik dari negara muslim seperti Iran. Dikeluarkannya fatwa ini juga tidak terlepas dari peran Maryam Khatoon Molkara. Maryam merupakan seorang aktivis transgender dari negara Iran.

Pertemuannya dengan Ayatullah Khomeini pada tahun 1982 inilah yang menjadi titik terang bagi para kaum transgender dan transeksual yang berusaha mencari keadilan dengan akses kepada teknologi kesehatan (operasi perubahan kelamin) ini. Dalam pertemuan tersebut, Maryam menceritakan bagaimana perjuangannya dengan kondisi yang dialami. Mulai dari diskriminasi yang dia alami hingga keaktifannya ketika menjadi tenaga medis ketika perang di Iran terjadi (Darling, 2017).¹³ Setelah melakukan diskusi dengan para ahli medis dan juga para ahli agama, Ayatullah Khomeini mengeluarkan fatwa yang tertulis dalam Imam Khomeini's Tahrir al-Wasila (Volume 4) (Kazmi, 2018). Fatwa ini dikeluarkan sebagai bentuk dari responnya terhadap kondisi yang dialami Maryam pada saat itu. Isi fatwa tersebut (yang telah di terjemahkan dari bahasa arab ke bahasa inggris) adalah tidak ada hambatan secara Islam dalam operasi perubahan kelamin, bila hal itu telah di setuju oleh dokter yang terpercaya (Saeidzadeh, 2016).¹⁴ Dengan dikeluarkannya fatwa ini, para kaum transgender dapat mengakses teknologi kesehatan dengan perlindungan hukum dan pengurusan dokumen secara legal bagi masyarakat Iran. Sumber: OutRight Transsexual Report in Iran (OutRight Action International, 2016)¹⁵

Pada persoalan akses teknologi kesehatan berupa operasi perubahan kelamin di Iran bagi komunitas transgender dan transeksual dipengaruhi oleh Affordability, Availability, dan Adoption. Pada aspek Affordability, keterlibatan Ayatollah dan Maryam merupakan yang paling penting. Hal ini karena sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Ayatollah di Iran. Kepemimpinannya dalam menciptakan kebijakan melalui fatwa nyatanya memberikan banyak keuntungan bagi komunitas transgender dan transeksual di Iran. Selain itu pendekatan yang digunakan oleh Maryam untuk mengangkat isu ini juga berpengaruh terhadap terjadinya akses teknologi kesehatan ini.

Maryam yang melakukan operasi perubahan kelamin diluar negeri melihat adanya peluang untuk mengangkat isu ini ketika berjumpa dengan Ayatollah pertama kali di Paris. Namun pertemuan pertama itu tidak memberikan pengaruh secara langsung. Hingga akhirnya, pertemuan berikutnya di Iran yang memberikan pengaruh yang signifikan. Penjelasan mengenai isu dan komunitas ini kepada Ayatollah memberikan pandangan baru baginya bahwa hal ini merupakan kondisi penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan prosedur operasi. Akhirnya Ayatollah mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar bagi seluruh komunitas transgender dan transeksual dalam menjalankan proses perubahan kelamin tersebut. Tidak hanya disetujuinya prosedur operasi perubahan kelamin saja. Identitas yang baru bagi komunitas transgender dan transeksual dijamin pemerintah dan akan diakui secara legal.

Pada aspek Availability dalam akses teknologi kesehatan ini di Iran, pemerintah menjamin adanya pengawasan ketat mulai dari awal perawatan hingga didapatnya identitas baru bagi komunitas transgender dan transeksual di Iran. Karena pemerintah menjamin hal itu maka perencanaan yang dilakukan pun

cukup ketat dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang harus benar-benar dilalui oleh individu yang akan melakukan prosedur perubahan kelamin. Tidak hanya itu pembiayaan yang dibebankan oleh pemerintah terhadap pasien tidaklah 100% tapi sebanyak 70% dari pengobatan dan perawatan akan ditanggung oleh pemerintah. Lebih lanjut lagi bagi transgender dan transeksual yang ingin melakukan prosedur operasi pergantian kelamin diluar negeri dengan biaya sendiri akan dibantu pemerintah dalam pengurusan pergantian identitas bila sudah kembali ke negara Iran. Ini menandakan bahwa manufaktur, perencanaan, pembelian, distribusi hingga pengiriman untuk membantu individu mendapatkan akses teknologi kesehatan perubahan kelamin telah dijamin pemerintah sehingga tidak ada keraguan dari rakyat dan pemenuhan HAM mereka dapat terwujud.

Pada aspek yang terakhir yaitu Adoption, akses teknologi kesehatan bagi para transgender dan transeksual di Iran dianggap telah sesuai dengan prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh tenaga medis di Iran. Bahkan secara nasional pengadopsian teknologi kesehatan ini tidak hanya berdampak bagi pengguna tetapi juga pada masyarakat secara luas. Bagi keluarga pengguna yang melihat akses ini sebagai jalan keluar bagi permasalahan transgender dan transeksual. Lebih lanjut lagi ketika pemerintah dan tim medis telah menyatakan dapat dilakukannya proses operasi pergantian kelamin itu artinya keluarga akan mendampingi setiap pengguna teknologi kesehatan tersebut dan memperlakukan mereka sesuai dengan identitas mereka yang terbaru. Tidak hanya itu, penerimaan para identitas baru juga didampingi oleh para ulama dari segi keagamaan. Hal ini dilakukan agar setiap pengguna teknologi kesehatan tersebut tidak merasa terbebani dengan identitas yang baru maupun status mereka sebagai transgender dan transeksual di negara yang religius tersebut.

Dari ketiga aspek tersebut yang menciptakan terjadinya akses terhadap teknologi kesehatan berupa operasi perubahan kelamin di Iran bagi para transgender dan transeksual, aspek Affordability adalah aspek yang paling menonjol pada proses terbentuknya kebijakan akses teknologi kesehatan tersebut. Hal ini karena adanya peran pemerintah yang menjamin kesehatan bagi masyarakatnya dapat dilihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah dapat menunjang secara medis bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut WHO, dengan peran pemerintah yang memperkuat sistem kesehatannya maka pemerintah akan mencapai tujuan dari peningkatan kesehatan, mengurangi ketidakseimbangan kesehatan, menjamin keadilan dalam pembiayaan kesehatan dan mampu mersepon apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya (Technical discussions: The role of government in health development, 2006).¹⁶ Dengan adanya kebutuhan para kaum transgender dan transeksual di Iran yang disuarakan oleh Maryam, maka pemerintah Iran melalui Ayatullah mewujudkannya. Selain peran pemerintah, aktivis, para pengguna, dan masyarakat di Iran, proses globalisasi yang membawa Media Masa sebagai

instrumen terbentuknya opini dan kebijakan juga memberikan dampak terhadap akses teknologi kesehatan ini.

Proses globalisasi tidak lepas dari adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan transportasi. Salah satu kemajuan tersebut adalah perkembangan dari teknologi informasi di bidang media massa. Pada dasarnya, dilihat dari kaca mata sosial, manusia membutuhkan satu sama lain. Kedudukan manusia dalam tatanan sosial hanya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk berinteraksi agar mendapatkan kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan sebagai makhluk individu, manusia melakukan kebiasaan dan rutinitasnya yang dilakukan secara pribadi. Atas dasar kebutuhan tersebut, untuk mempermudah menjalankan rutinitas sehari-hari manusia berupaya mencari dan menciptakan sistem dan alat untuk saling berinteraksi, mulai dari gambar (bentuk lukisan), isyarat (tangan, asap, dan bunyi), huruf, kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet. Usaha untuk saling berinteraksi satu sama lain itulah yang akhirnya berkembang menjadi istilah Teknologi Informasi (Suryana, 2012).¹⁷

Maka dari itu, seiring dengan fenomena globalisasi, teknologi informasi menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam transformasi kehidupan manusia, mulai dari kegiatan ekonomi, masyarakat, bahkan dalam pemerintahan sekalipun. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena dengan berkembangnya teknologi informasi, perekonomian suatu negara mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Mohanty, 2017).¹⁸ Media massa merupakan sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi, sehingga media massa memiliki fungsi dan peranan yang besar dalam membagikan informasi kepada audiensnya (sebutan untuk para konsumen dari media) (Rivers et al., 2008). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa media massa di masa globalisasi seperti sekarang, menjadi aktor yang cukup penting bagi manusia apalagi dalam hubungan internasional. Dengan berkembangnya teknologi yang memudahkan penyajian berita dan informasi secara real-time, menjadikan media sebagai konsumsi utama public dan seringkali menjadi pertimbangan penting bagi para pembuat kebijakan.

Media dan hubungan internasional memiliki hubungan timbal-balik, aksi reaksi antar satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena media memiliki

pengaruh dalam perumusan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara terkait isu tertentu. Dalam teori imperialism menurut Johan Galtung, media adalah instrument dari elit politik negara maju untuk mendominasi negara berkembang (Galtung, 1971). Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu, media dapat menjadi aktor penting dalam hubungan internasional ketika media, pertama, sanggup merubah kebijakan luar negeri suatu negara atau mengubah agenda setting dalam hubungan internasional. Kedua, sanggup memprovokasi dalam aksi-reaksi bagi pembuat kebijakan atau aktor internasional. Ketiga, sanggup mampu mempengaruhi opini publik tentang keputusan terkait suatu fenomena di hubungan internasional (Yordania, 2012).¹⁹

Pada kasus akses teknologi kesehatan berupa operasi kelamin bagi para transgender dan transeksual di Iran, media massa memberikan dampak bagi dunia internasional dalam melihat arah kebijakan Iran sebagai arah yang lebih baik bagi HAM. Pemberitaan di media online maupun media cetak yang menilai Iran sedang melakukan langkah ekstrim menjadikan Iran sebagai negara religius pertama yang mementingkan HAM. Namun dilain sisi, terdapat dampak yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Pendapat-pendapat tersebut muncul dari kelompok LGTBQ+ yang tidak ingin melakukan operasi perubahan kelamin. Tidak ingin dilakukannya operasi kelamin bagi orang-orang ini karena mereka menganggap bahwa yang terjadi pada diri mereka bukanlah suatu kelainan ataupun penyakit yang dapat disembuhkan dengan dilakukannya prosedur operasi kelamin.

Kesimpulan

Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengakses suatu teknologi kesehatan, peran pemerintah dan juga pengguna harus memiliki kemampuan untuk menyediakan akses tersebut. Dalam kasus akses teknologi kesehatan bagi para transgender dan transeksual di Iran ditemukan bahwa peran Maryam sebagai pengguna yang membutuhkan akses teknologi tersebut dan peran Ayatullah sebagai pemerintah yang menyediakan akses teknologi tersebut bahkan menjamin keamanan dan keamanan penggunaan alat kesehatan tersebut akhirnya membantu banyak kaum transgender dan transeksual bila membutuhkan operasi perubahan kelamin. Pandangan masyarakat internasional terhadap proses inipun menjadikan Maryam dan Ayatollah sebagai tokoh utama dalam terwujudnya fatwa dan kebijakan terhadap akses kesehatan bagi para transgender dan transeksual di Iran melalui proses operasi perubahan kelamin.

Endnote

¹ Yordania, T. (2012). Media-International Relations Interaction Model. Institute for Security and International Studies.

² Technical discussions: The role of government in health development, (2006).

³ Wilujeng, S. R. (2019). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis.

⁴ United Nations. (2015). Universal Declaration of Human Rights.

⁵

<https://books.google.co.id/books?id=X8h5uq5XSYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

⁶ Suryana, D. (2012). Mengenal Teknologi.

⁷ Sumarno, W. F. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979. 3(2), 145–158. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>

⁸ Sujati, B. (2019). Peran Ayatullah Khomeini dalam Revolusi Islam di Iran 1979 PERAN AYATULLAH KHOMEINI DALAM REVOLUSI. April. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v7i1.7756>

⁹ Saeidzadeh, Z. (2016). Transsexuality in Contemporary Iran: Legal and Social Misrecognition. *Feminist Legal Studies*, 24(3), 249–272. <https://doi.org/10.1007/s10691-016-9332-x>

¹⁰ Rivers, W. L., Jensen, J. W., & Peterson, T. (2008). Media Massa dan Masyarakat Modern. Kencana Prenada Media.

¹¹ Mohanty, S. K. (2017). Globalization, Innovation, and Marketing Philosophy: A Critical Assessment of Role of Technology in Defining New Dimensions. Birla Global University.

¹² OutRight Action International. (2016). Human Rights Report: Being Lesbian in Iran. <http://outrightinternational.org/iran>

¹³ Galtung, J. (1971). A Structural Theory of Imperialism. *Journal of Peace Research*, 8(2).

¹⁴ Bagri, N. T. (2017). everyone treated me like a saint- In Iran, the only one way to survive as a transgender person. <https://qz.com/889548/everyone-treated-melike-a-saint-in-iran-theres-only-one-way-to-survive-as-a-transgender-person/> Baylish, & Smith. (2004). The Globalization of World Politics 3rd Edition.

¹⁵

<https://books.google.co.id/books?id=X8h5uq5XSYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

¹⁶ Mohanty, S. K. (2017). Globalization, Innovation, and Marketing Philosophy: A Critical Assessment of Role of Technology in Defining New Dimensions. Birla Global University.

¹⁷ Galtung, J. (1971). A Structural Theory of Imperialism. *Journal of Peace Research*, 8(2).

¹⁸ OutRight Action International. (2016). Human Rights Report: Being Lesbian in Iran. <http://outrightinternational.org/iran>

¹⁹ Bagri, N. T. (2017). everyone treated me like a saint- In Iran, the only one way to survive as a transgender person. <https://qz.com/889548/everyone-treated-melike-a-saint-in-iran-theres-only-one-way-to-survive-as-a-transgender-person/> Baylish, & Smith. (2004). The Globalization of World Politics 3rd Edition.

References

Ayu, A., Yudah, P., & Indonesia, U. (2013). Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Indonesian Journal of Criminology*, 9(2), 37–49.

Bagri, N. T. (2017). everyone treated me like a saint- In Iran, the only one way to survive as a transgender person. <https://qz.com/889548/everyone-treated-melike-a-saint-in-iran-theres-only-one-way-to-survive-as-a->

-
- transgender-person/ Baylish, & Smith. (2004). *The Globalization of World Politics* 3rd Edition.
- Brysk, A. (2002). *Globalization and Human Rights*. University of California Press.
- Darling, L. (2017). *Maryam Khatoon Molkara, A Woman who Changed Her Country*.
- <https://www.makingqueerhistory.com/articles/2017/3/18/maryam-khatoonmolkara-a-woman-who-changed-her-country>
- Frost, L. J., & Reich, M. R. (2009). Creating access to health technologies in poor countries. *Health Affairs*, 28(4), 962–973.
<https://doi.org/10.1377/hlthaff.28.4.962>
- Galtung, J. (1971). A Structural Theory of Imperialism. *Journal of Peace Research*, 8(2).
- Jati, W. R. (2013). Memahami Globalisasi sebagai Evolusi Kapitalisme. *Jurnal Global Dan Strategis*, 7(2).
- Kazmi, W. A. (2018). *Maryam Khatoon Molkara and Transsexuality in Shia Islam*. KPPPA dan Pusat Penelitian Kesehatan UI. (2015). *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*. 78.
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0ea2c-1-laporan-lgbt-transgender.pdf>
- Mohanty, S. K. (2017). *Globalization, Innovation, and Marketing Philosophy: A Critical Assessment of Role of Technology in Defining New Dimensions*. Birla Global University.
- OHCHR. (2016). *Universal Declaration of Human Rights*.
- OutRight Action International. (2016). *Human Rights Report: Being Lesbian in Iran*. <http://outrightinternational.org/iran>
- Rivers, W. L., Jensen, J. W., & Peterson, T. (2008). *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Kencana Prenada Media.
- Saeidzadeh, Z. (2016). Transsexuality in Contemporary Iran: Legal and Social Misrecognition. *Feminist Legal Studies*, 24(3), 249–272.
<https://doi.org/10.1007/s10691-016-9332-x>

-
- Sujati, B. (2019). Peran Ayatullah Khomeini dalam Revolusi Islam di Iran 1979
PERAN AYATULLAH KHOMEINI DALAM REVOLUSI. April.
<https://doi.org/10.24252/rihlah.v7i1.7756>
- Sumarno, W. F. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979. 3(2),
145–158. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>
- Suryana, D. (2012). Mengenal Teknologi.
<https://books.google.co.id/books?id=X8h5uq5XSYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- United Nations. (2015). Universal Declaration of Human Rights.
- Wilujeng, S. R. (2019). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis.
- Technical discussions: The role of government in health development, (2006).
- Yordania, T. (2012). Media-International Relations Interaction Model. Institute for Security and International Studies.